KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembahasan RUU TPKS Perlu Dipercepat
Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

WORKSHOP MEMBANGUN CITRA KEHUMASAN Kedeputian Ogan Media Informasi Dan Komunikasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Workshop Membangun Citra Kehumasan di Auditorium BPSDM Kemendagri, Jakarta, kemarin. BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Jurnalistik Media Indonesia (SJMI) menyelenggarakan workshop Membangun Citra Kehumasan yang ditujukan kepada pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (M-3)

Pranata Humas Harus Bisa Rangkul Publik

PERAN pranata humas (hubungan masyarakat) sangat strategis, penting, dan berpengaruh dalam membangun citra kementerian dan lembaga yang menaunginya agar diterima publik dengan baik.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Ingub Setyabudi, secara terbuka pranata humas perlu mendapatkan informasi valid mengenai pemerintahan atau pelayanan publik dan pemerintah. Lebih bagus lagi, bila informasi valid itu didukung pemahaman jurnalistik yang tepat dari humas pemerintah.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalistik tersebut, BPSDM Kemendagri bekerja sama dengan Sekolah Jurnalistik Media Indonesia (SJMI). Kerja sama ini bertujuan membangun citra kehumasan di lingkungan Kemendagri agar lebih baik lagi.

"Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalistik tersebut, BPSDM Kemendagri bekerja sama dengan Sekolah Jurnalistik Media Indonesia (SJMI). Kerja sama ini bertujuan membangun citra kehumasan di lingkungan Kemendagri agar lebih baik lagi," ujar Ingub dalam sambutan pembukaan Workshop Membangun Citra Kehumasan di lingkungan Kemendagri, kemarin.

Lebih lanjut, Ingub mengatakan humas merupakan profesi yang menjadi hubungan harmonis antara organisasi dan publik untuk mencegah ancaman publikasi yang negatif maupun isu. Bahkan, imbuhnya, merupakan satu-satunya manajemen yang berperan mengembangkan antara organisasi dan stakeholder lainnya. "Humas harus mengelola hubungan organisasi dan sebagai juru bicara berita baik sehingga publik dapat diklarifikasikan dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Redaktur Pelaksana Media Indonesia Ike Sugeng Pranoto mengatakan pranata humas perlu memiliki kemampuan jurnalistik dalam pembuatan siaran pers. Selain memberikan bahan siaran dan konten pemicu berita sangat berpengaruh.

"Siaran pers yang publikasikan dengan media mainstream menjadikan berita dan pernyataan siaran pers yang memenuhi kaidah jurnalistik dan tidak hanya menyebutkan profil pejabat," jelas Ike sebagai narasumber. (Ant/H-1)

16.777 Mahasiswa Kampus Mengajar Dilepas

Pembahasan RUU TPKS Perlu Dipercepat

Penanganan kasus TPKS secara operasional hukum di lapangan sudah gagal pada tahap awal penyelidikan. Jika pun proses berjalan, sering kali pihak korban justru yang ter(in)timidasi.

MOHAMAD FARHAN ZAHUT

KOMISI Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Komnas Perempuan menegaskan hak hak pemerintah maupun DPR harus terbuka dalam pembahasan dan memikirkan berbagai pihak yang terkait produk hukum ini. Ratna Batara Munti, Komisioner Komnas Perempuan, kemarin.

Menurut Ratna, pemerintah saat mengajukan surpres untuk membahas RUU TPKS ke DPR, Komnas Perempuan mengapresiasi. Namun, ia mengingatkan pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

"Jangan sampai pembahasan RUU TPKS ini justru menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Kami mengingatkan pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati," ujar Ratna.

Ia menjelaskan, pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena pihaknya mendapatkan banyak laporan dari korban kekerasan seksual yang mengalami kesulitan dalam proses penanganan kasus. Ia mencontohkan, ada korban yang sudah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi justru dituduh melakukan pencemaran nama baik.

"Ada juga yang sudah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi justru dituduh melakukan pencemaran nama baik. Ini kan sangat ironis," ujar Ratna.

Ia menambahkan, dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa korban justru mengalami kesulitan dalam proses pembuktian. Ia mencontohkan, ada korban yang sudah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi justru dituduh melakukan pencemaran nama baik. Ini kan sangat ironis," ujar Ratna.

Ia menambahkan, dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa korban justru mengalami kesulitan dalam proses pembuktian.

Kasus KSBO sulit untuk diproses jika pelaku sudah menghapus tayangan dan alat bukti yang kurang.

Willy menambahkan, kesulitan lainnya yang dihadapi pengguna DPR ialah Barang Bukti (BB) elektronik yang sudah dihapus oleh pelaku. Padahal, BB elektronik tersebut sangat penting untuk dijadikan alat bukti yang kuat.

"Kasus KSBO sulit untuk diproses jika pelaku sudah menghapus tayangan dan alat bukti yang kurang. Kita harus segera mengesahkan RUU TPKS," ujar Willy.

Anggap remeh

Penetapan RUU TPKS ini sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual. Sebab, selama ini, banyak aparat penegak hukum yang menganggap remeh kasus kekerasan seksual.

"Penetapan RUU TPKS ini sangat penting untuk memberikan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual. Sebab, selama ini, banyak aparat penegak hukum yang menganggap remeh kasus kekerasan seksual," ujar Willy.

Ia menambahkan, dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa korban justru mengalami kesulitan dalam proses pembuktian.

Nantinya, mahasiswa akan menjadi partner guru dalam menginovasi pembelajaran.

SEKILAS

KPPPA Persoalkan Hak Restitusi Korban Pemerkosaan HW Cibiru

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendesak pemerintah setempat agar mengupayakan pemenuhan hak restitusi kepada korban pemerkosaan HW di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Karena itu, merupakan kewajiban pemerintah. "Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak. KPPPA harap segera kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Selain itu, diberikan kepada negara memastikan hak restitusi korban dirasa tidak cepat," katanya dalam keterangan tertulis, semalam.

Dalam putusannya, majelis hakim PN Kelas 1A Bandung memberikan restitusi kepada korban pemerkosaan tersebut. Namun, majelis hakim hanya memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp300 juta. Padahal, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya telah mengajukan restitusi sebesar Rp331 juta. Restitusi tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan korban selama proses pemulihan. (Ant/H-2)

Ancaman Kelangkaan Air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Meningkat

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia.

Perubahan pola curah hujan, kekeringan yang berkepanjangan, dan kejadian-kejadian ekstrem akan menyebabkan ketersediaan air menjadi semakin terbatas, kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, semalam.

Ia menyebutkan, hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Prognosis wilayah krisis air meningkat dari 6,8% pada 2008 menjadi 9,6% di 2045.

Ia tidak hanya ditunjukkan untuk rumah tangga, tapi juga industri dan pertanian. Karena permintaan lebih besar dari ketersediaan, maka air pun terjadi. Perkiraan tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas," ujarnya. (Ant/H-2)

Naskah Akademik Wajib Ada dalam Penyusunan Kurikulum Merdeka

FOUNDER Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Rizal menyebut naskah akademik sebagai syarat wajib dalam penyusunan kurikulum merdeka. Sebab, naskah akademik ini berisi pokok pikiran dan penjelasan tentang kurikulum merdeka.

Naskah akademik ini bisa jadi acuan bagi para pengembang kurikulum merdeka di sekolah. Dan sebuah dapat juga dibuat oleh dosen yang membangun kurikulum merdeka. (Medcom.id/H-2)

Dr HR Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional